

SKRIPSI

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ENREKANG**



Disusun oleh:

**MULIANTI
2014.235.00.124**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

MULIANTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.124

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 7 Juni 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

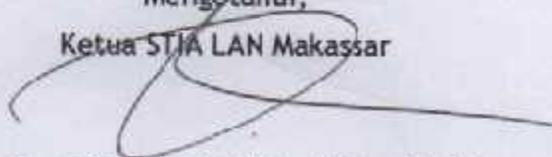


Ahsan Anwar, SE, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG**

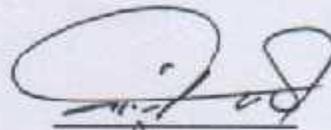
Pada hari ini, Kamis, 7 Juni 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Mulianti** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.124

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

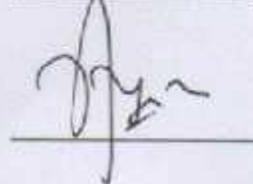
Ketua Tim : Dr. Najmi Kamariah, SE, M.Si



Sekretaris : Syamsuddin, S.Hum, M.Si



Anggota : Ahsan Anwar, SE, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar,.....

Yang menyatakan,



MULIANTI
NPM. 2014.235.00.124

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang”.

Dalam kurun waktu penulisan terdapat banyak hambatan,tantangan dan masalah dalam menyiapkan skripsi ini namun dapat terselesaikan.Semua tak lepas berkat dukungan Bapak Ahsan Anwar,SE,M.Si selaku pembimbing yang membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran yang membangun serta dukungan dari orang-orang terdekat,karib kerabat dan orang-orang sekitar sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Maka ijinkan penulis terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin,MDA,Ph.D selaku Ketua STIA LAN Makassar,yang telah memberikan ijin dan arahan yang baik sehingga penulis memperoleh ilmu yang banyak dan pendidikan yang baik selama di kampus STIA LAN Makassar.
2. Bapak Drs.H.Muslimin Bando selaku Bupati Enrekang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis unntuk mengikuti dan menyelesaikan ijin belajar di STIA LAN Makassar.

3. Bapak Ir.H.Umar Sappe,MBA selaku Kepala Dinas Terima kasih atas segala bantuan selama penulis mengadakan penelitian
4. Bapak Dr.Alam Tauhid Syukur,S.Sos,M.Pd selaku Ketua Program Studi atas ijin dan saran yang diberikan makin membuka wawasan dan pemikiran selama menulis skripsi ini
5. Bapak Abd.Manan,SE selaku Kepala Bidang UKM beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam memberikan data selama melakukan penelitian.
6. Rekan-rekan seperjuangan kelas Enrekang atas kebersamaan dan persaudaraan yang telah terjalin selama masa perkuliahan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongannya semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisi-Nya.Amin...

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Maka dari itu penulis harapkan kritik dan saran dari semua pihak agar kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini bisa di perbaiki.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, April 2018

(MULIANTI)

ABSTRAK

MULIANTI (NPM.2014.235.00.124), Strategi Pemberdayaan UKM. Pada Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Enrekang. Dibimbing oleh Ahsan Anwar,SE,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kukmnakertrans dalam memberdayakan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang berfokus pada sektor perdagangan. Hal ini di latarbelakangi oleh munculnya pasar-pasar modern yang merambah ke pelosok-pelosok daerah, sehingga secara tidak langsung mematikan pasar-pasar tradisional. Sehingga hal ini berdampak pada pelaku UKM yang menghasilkan produk dengan kualitas rendah tidak dapat bersaing dengan produk di pasar modern. Dalam hal ini mekanisme pemasaran yang menjadi salah satu tolak ukur dalam pengembangan UKM. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kukmnakertrans harus dimaksimalkan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan produk yang inovatif. Dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah diperlukan tiga fase yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini berdasarkan dari fase inisial, fase partisipatoris, fase emansipatoris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dalam memberdayakan Usaha Kecil, dan Menengah tidak berjalan optimal. Maka dari itu pemerintah memberikan agenda dari setiap kegiatan UKM berdasarkan dari aturan Dinas Koperasi,UKM,Tenaga kerja dan Transmigrasi yaitu pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat memasarkan produksinya dengan baik dan pelaksanaan penyuluhan disetiap tempat didesa atau kecamatan serta kebijakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang.Keterlibatan masyarakat dalam setiap program pelatihan,penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mendapat respon yang cukup baik serta antusias masyarakat memberdayakan UKM juga cukup besar.Asset,Volume dan sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut.

Kata Kunci : Strategi Pemberdayaan, UKM

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	10
1. Pengertian strategi	10
2. Pengertian Pemberdayaan	15
3. Pengertian UKM	19
B. Defenisi Konsep	21
C. Model Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29

E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	31
G. Pengujian Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
C. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah UMKM dari Tahun 2015 s/d 2017.....	5
TABEL 2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	43
TABEL 3 Daftar Pegawai Negeri Sipil	44
TABEL 4 Daftar Pegawai Negeri Sipil & Honorer berdasarkan Pendidikan	45
TABEL 5 Perkembangan Jumlah UKM.....	46
TABEL 6 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan.....	46
TABEL 7 Program Pengembangan Kompetitif UKM	53

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Model Kerangka Konsep	25
GAMBAR 2 Kegiatan Pelatihan UKM.....	49
GAMBAR 3 Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan pengembangan UKM.....	51
GAMBAR 4 Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan pengembangan UKM.....	55
GAMBAR 5 Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan pengembangan UKM	56
GAMBAR 6 Kegiatan Usaha Kecil dan menengah	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 237.641.326 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar diharapkan mampu mengimbangi pembangunan diberbagai sektor dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara. Namun data BPS pusatmenunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8.319.779 jiwa. Cadangan devisa Indonesia pun masih kalah banyak dengan cadangan devisa negeri tetangga. Ini membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengentaskan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan

ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. Hingga tahun 2011 UKM mampu memberikan andil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7% melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS (Badan Pusat Statistik), 2011).

Namun demikian, perkembangan UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan

dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain (Sudaryanto, Ragimun, dan Rina Wijayanti : Strategi Pemberdayaan UKM Menghadapi Pasar Bebas Asean). Bahkan beberapa hasil penelitian (Nurhajati : 2005, hal 7) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan.

Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut secara institusi ditunjukkan melalui pembentukan kementerian yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejak zaman pemerintah orde baru. (Nursalam, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ,2010, hal 4).

Selain itu, secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, dalam praktek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengatasi kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (Nursalam : 2010, hal 7).

Upaya-upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Strategi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu penerapan strategi dapat menentukan hasil yang akan dicapai. Adapun strategi yang dimaksud disini adalah strategi manajemen dalam memberdayakan UKM yang lebih berorientasi pada pengembangan strategi secara makro. Melihat kondisi kekinian tentunya peran seluruh stakeholder dalam implementasi dari strategi pemberdayaan tersebut sangat diharapkan.

Lebih lanjut lagi mengenai hal yang akan dikaji lebih mendalam oleh penulis adalah bagaimana strategi pemberdayaan UKM disektor

perdagangan oleh Dinas Koperasi, UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Enrekang. Hal demikian didasari oleh asumsi bahwa sektor perdagangan selama ini semakin berkembang pesat dengan mencakup hampir seluruh pelosok daerah Kab.Enrekang. Data berikut menggambarkan jumlah penyebaran UKM tiap Kecamatan se-Kab.Enrekang.

Tabel 1
Jumlah UMKM dari Tahun 2015 s/d 2017 di Kab.Enrekang

No	TAHUN	Jenis Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2015	2035	778	2	2815
2	2016	3312	976	3	4291
3	2017	4120	1251	6	5377

Sumber : diskopnakertrans.ekg@gmail.com (2018)

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tahun 2015 s/d 2017 mencapai angka yang cukup signifikan, terutama pada jenis usaha Kecil dengan angka 1251. Selain itu perkembangan tersebut membawa dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah hingga mencapai ribuan orang, sehingga ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Data lain juga menunjukkan sejauh mana tingkat perkembangan UKM disektor perdagangan di Kab.Enrekang yang dianggap berkembang pesat dibanding sektor lainnya.

Perkembangan UKM di Kabupaten Enrekang menjadi hal yang menarik dikaji karena bidang ini menjadi salah satu fokus pembangunan dengan memberdayakan masyarakat. Akan tetapi muncul masalah yang menjadi hambatan dalam perkembangan UKM disektor perdagangan tersebut, diantaranya adalah mekanisme pemasaran produk maupun jasa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada perkembangan pasarmodern yang tak bisa terbendung dan memiliki strategi yang jauh lebih inovatif dibanding usaha-usaha kecil dan menengah. Selain itu, keberadaannya yang mampu menghadirkan kebutuhan konsumen dengan fasilitas yang lebih baik, dikelola dengan lebih professional dan harga yang lebih murah, dkuatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional di masyarakat. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pasar tradisional dari satu sisi memang banyak memiliki kekurangan seperti lokasinya yang kadang mengganggu lalu lintas, kurang tertata, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar terhadap perkembangan UKM di Kab. Enrekang.

Selain itu kedudukan beberapa pasar modern yang letaknya saling berdekatan disepanjang jalan dan berdekatan pula dengan pasar tradisional di Kab. Enrekang. Berdasarkan data pasar dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 16 Pasar Tradisional, di Kab. Enrekang. Selain pelayanan mereka juga menawarkan harga yang relatif lebih rendah, variasi barang yang banyak, tempat belanja yang nyaman.

Mereka saling berusaha untuk menambah fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan menurut persepsinya masing-masing.

Adapun jumlah pasar tradisional yang tersebar di Kab. Enrekang terdiri dari 16 pasar yaitu Pasar Sentral Enrekang, Pasar Cakke, Pasar Sudu, Pasar Maroangin, Pasar Baraka, Pasar Kotu, Pasar Temban, Pasar Kabere, Pasar Lo'Ko, Pasar Buntu Dama, Pasar Malua, Pasar Curio, Pasar Lebani, Pasar Bungin, Pasar Bataran, dan Pasar Banti sedangkan Pasar Modern yaitu Indomart dan Mini Market. Menurut data dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga tahun 2017 jumlah pedagang mikro mencapai 4120 usaha, pedagang kecil sekitar 1251 usaha, dan pedagang menengah sekitar 6 dengan menyerap sekitar angka 12.405 orang (*diskopnakertrans.ekg@gmail.com*).

Dengan melihat bahwa jumlah pedagang UKM yang cukup besar memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Mengingat kegiatan perdagangan UKM tersebut merupakan pilar yang menopang pada Kab.Enrekang. Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu "STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah, yaitu : Bagaimana strategi Dinas Kopukmnakertrans di Kab.Enrekang dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada sektor perdagangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Enrekang yang dapat dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini

diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer, sedangkan organisasi baru mulai mengadopsinya pada pertengahan tahun 60-70an. Salah satu alasan mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi sebagai suatu kerangka kerja dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan. Guna memahami konsep strategi terkait dengan penelitian ini, maka berikut beberapa defenisi mengenai strategi.

Strategi itu sendiri berasal dari istilah Yunani, *strategos*, memiliki arti harfiah “jenderal”. Sehingga, secara harfiah pula, strategi dimaknai sebagai seni berperang para jenderal yang memimpin suatu peperangan. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Ernest Wood, Ketua Dewan Komisaris Sears, Roebuck & Co, dalam satu segi, bisnis atau usaha merupakan medan pertempuran. Dalam pengertian kekinian, strategi terkait erat dengan bagaimana manajemen puncak suatu organisasi atau perusahaan yang harus mengatur siasat sedemikian rupa sehingga persaingan yang ketat mampu dimenangkan. (Stoner.1996)

Begitu pula yang ditegaskan oleh Chandler (1962:13) yang pertama kali mendefinisikan strategi menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.”

Argyris (1985), Mintzberg (1979), Miner (1977) menyatakan strategi merupakan respon—secara terus-menerus maupun adaptif—terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Andrew (1980), Chaffe (1985) mengemukakan strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Hammel dan Prahalad (1995) menyatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari pengertian-pengertian strategi yang dikemukakan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah tindakan yang diambil dari beberapa pilihan yang kemudian diputuskan oleh perusahaan atau organisasi secara terus-menerus guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

a. Tipe-tipe Strategi

Menurut Fredy (2009:6) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu, strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

1. Strategi Manajemen, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.
2. Strategi Investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.
3. Strategi Bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya, strategi pemasaran, strategi

produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

b. Tahap Formulasi Strategi

Tahap formulasi atau pelaksanaan strategi diawali oleh perumusan visi, misi dan nilai. Kemudian dilanjutkan menentukan dengan menganalisis/melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal. Menurut David, aplikasi untuk menentukan strategi utama dilakukan melalui pemakaian beberapa matriks dengan tiga tahap pelaksanaan sebagai berikut:

a. Tahap 1: Tahap masukan

Semua informasi dasar mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi dirangkum oleh pembuat strategi.

b. Tahap 2: Tahap pencocokan

Pembuat strategi melakukan identifikasi alternatif strategi dengan mencocokkan informasi input berupa faktor eksternal dan internal yang diperoleh pada tahap input. Pada tahap pencocokan ini, dilakukan identifikasi hanya dengan menggunakan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threat*).

c. Tahap 3: Tahap kelanjutan

Metode ini adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan faktor kunci kesuksesan internal-eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Secara konseptual, tujuan metode ini untuk menetapkan kemenarikan relatif dari strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan strategi mana paling baik untuk di implementasikan.

c. Formulasi Strategi Dalam Analisis SWOT

Siapa pun yang sudah bisa berkecimpung dalam kegiatan perumusan strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis “SWOT” merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata “*Strengths,*” (Kekuatan), “*Weaknesses,*” (Kelemahan), “*Opportunities,*” (Peluang), tentang Usaha Kecil dan Menengah.(Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-

faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Jika dikatakan bahwa analisis “SWOT” dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk minimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan (Siagian, 2004 (hal:172-174).

Faktor-faktor berupa Kekuatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber, keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Contoh bidang-bidang keunggulan itu antara lain ialah kekuatan pada sumber keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan dengan pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan para berbagai pihak yang berkepentingan.

Faktor-faktor Kelemahan. Jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu satuan bisnis, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja

organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

Faktor Peluang. Definisi sederhana tentang peluang ialah “berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.” Yang dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain ialah:

1. Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk ,
2. Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian,
3. Perubahan dalam kondisi persaingan,
4. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan,
5. Membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha,
6. Hubungan dengan para pembeli yang “akrab,” dan
7. Hubungan dengan pemasok yang “harmonis.”

Faktor Ancaman. Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman “adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.” Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi “ganjalan” bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Berbagai contoh, antara lain adalah:

1. Masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis,
2. Pertumbuhan pasar yang lamban,
3. Meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan,
4. Menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk proses lebih lanjut menjadi produk tertentu,
5. Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai,
6. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif.

2. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian. Pertama: memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Kedua, usaha untuk memberi kemampuan. Garna (2000:3) Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996), mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus dibedayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. “Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.”

Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf

pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal,teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraanantara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Sementara itu Totok dan Poerwoko (2013:14) memberikan defenisi pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan.

Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha ini dimaksudkan adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi,

keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najati sry ,2005:54). Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan ,melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam

tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.

4. Pengertian UKM

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998; Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

a. Peranan UKM

Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Departemen Koperasi dan UKM

Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataannya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.

b. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi:

Faktor Internal:

- Kurangnya permodalan-permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
- Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil. Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

Faktor Eksternal:

- Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar.

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.
- Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

B. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah merupakan bahasan-bahasan yang dipakai untuk menghindari interpretasi yang lain terhadap variable yang diteliti. Adapun yang menjadi indikator dalam proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang menurut Pranaka dan Priyono (1996) yaitu :

a. Pelatihan

Pelatihan adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada pekerja atau masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai fasilitas baru

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program atau tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas.

c. Kebijakan

Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi dibawahnya agar tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Kebijakan ini bisa berupa bantuan modal, kelengkapan sarana dan prasarana.

d. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program

Keaktifan masyarakat ketika ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar bisa diketahui sejauh mana hubungan antara pemerintah dan masyarakat, saling mendukung atau saling menjatuhkan.

e. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat dibutuhkan karena perkembangan program tersebut didasarkan oleh tidak lanjut maupun respon dari masyarakat terkait. Selain memberi pendapat, masyarakat juga diharapkan dapat menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan tersebut.

f. Asset

Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat guna untuk mengembangkan usaha mereka.

g. Volume Usaha

Volume usaha merupakan bila usaha yang dipakai dari pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha yang dikelola.

h. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memelihara keberlanjutan kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang telah diputuskan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang sama. Konsekuensinya, masyarakat harus berdaya untuk berperan serta dalam pembangunan. Maka sebuah keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (*sustainable*).

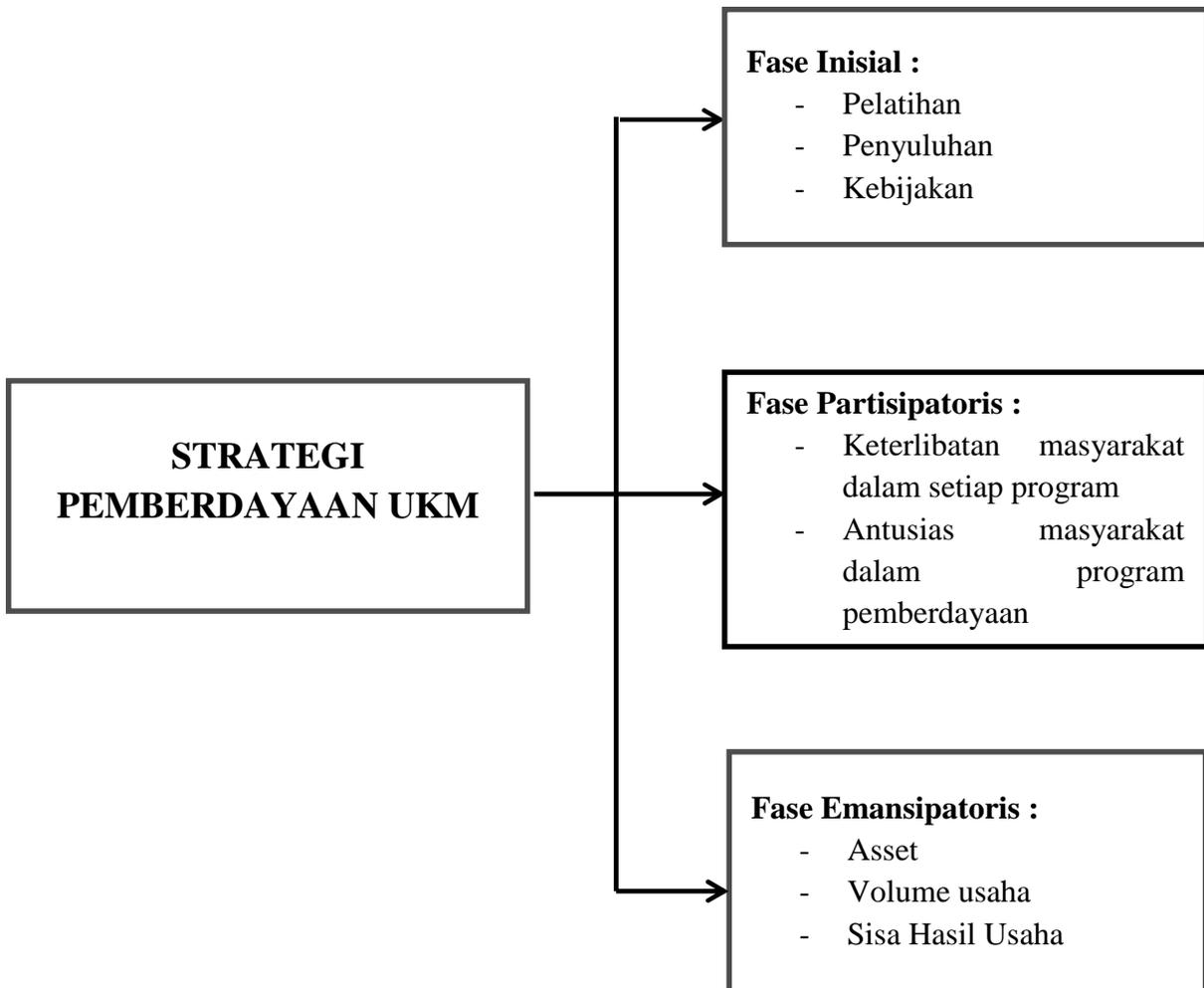
C. Model Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka konsep ini melihat strategi Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu juga mengacu pada konsep Pranaka dan Priyono tentang tiga fase yang harus dilakukan dalam memberdayakan masyarakat atau kelompok.

Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka konsep dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Model Kerangka Konsep Berdasarkan Strategi Pemberdayaan UKM



D. Pertanyaan Penelitian

Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Strategi Pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada Fase Inisial?
2. Bagaimanakah Strategi Pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada Fase Partisipatoris?
3. Bagaimanakah Strategi Pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada Fase Emansipatoris?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan dua alasan pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiah.

Chariri (2009:05) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu. Chairir (2009:05) menambahkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa social tertentu sehingga peneliti mampu mengungkapkan system interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat para pelaku Usaha Kecil Menengah serta dilakukan pula pada Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2011:03).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang adasekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemberdayaan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunkana pada penelitian ini adalah data subyek dan data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan karena data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh penelti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan penelitian lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Kepala Bidang UKM, Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM serta masyarakat pelaku UKM.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Penelitian tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literature, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Kepala Bidang UKM di Kantor Dinas Kukmnakertrans
- b) Masyarakat pelaku UKM

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat.

3. Telaah dokumen dimaksudkan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variable berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, foto-foto, laporan-laporan dan karya –karya ilmiah dari seseorang, peraturan dan kebijakan. Telaah

dokumen akan melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Telaah dokumen ini cukup mudah dalam arti bahwa datanya masih bersifat tetap apabila terjadi kekeliruan mengingat data ini tidak berubah.

4. Internet merupakan peneliti yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Handphone
2. Kamera
3. Alat tulis
4. Daftar pertanyaan wawancara
5. Buku, jurnal dan referensi lainnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat

memberikan informasi (gambaran) tentang Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan internet yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan yaitu dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lapangan. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Adapun prosedur dari analisa data adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data melalui instrument dari pengumpulan data.
2. Tahap editing yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat didalam instrument pengumpulan data.
4. Tahap pengujian data yaitu menguji validitas dan reabilitas instrument pengumpulan data.
5. Tahap penyajian data yaitu dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan serta mendapatkan hasil yang valid.

Jadi kesimpulan dari peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Lewat dari data itu akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bias menentukan kebrmaknaan data atau informasi diperlukan penelitian secara mendalam.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Meleong dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua metode dari teknik triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain bias wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomimasyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam tenaga kerja serta transmigrasi perkembangannya dalam perekonomian nasional terutamayang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi diperkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dukungan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada pemerintah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), urusan tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tersebut di atas, maka struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pembiayaan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM;
 - 2) Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Promosi UKM.
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

- 2) Seksi Pembangunan Jamsos dan Keselamatan kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
- 1) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

1. Visi dan Misi

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran, peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sejalan dengan visi Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018, maka visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 adalah :“Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sehat dan mandiri, disukung renaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, berdaya saing menuju Enrekang yang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS)”.

Diharapkan rumusan visi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UKM;
- 2) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan UKM yang profesional;
- 3) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja;
- 4) Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif dalam bekerja dan berusaha;
- 5) Pengembangan kawasan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman transmigrasi berwawasan lingkungan;
- 6) Mendorong sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pedoman susunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin Dinas/Kantor dalam hal melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Permusatan kebijakan teknis operasional pembinaan, pelatihan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
 - c. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas;
 - e. Pengelolaan penyusunan program dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan program, menganalisis dan menelaah bahan rumusan kebijakan pengendalian program, melakukan hubungan kerja dan menyusun laporan kegiatan progra.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

3) Kepala Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang koperasi.

1. Seksi Kelembagaan Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memahami, menghimpun, menganalisis dan menyusun program serta merumuskan bahan kebijakan kelembagaan koperasi.

2. Seksi pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memahami, menghimpun, menganalisis dan menyusun program serta merumuskan bahan kebijakan pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi.

4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

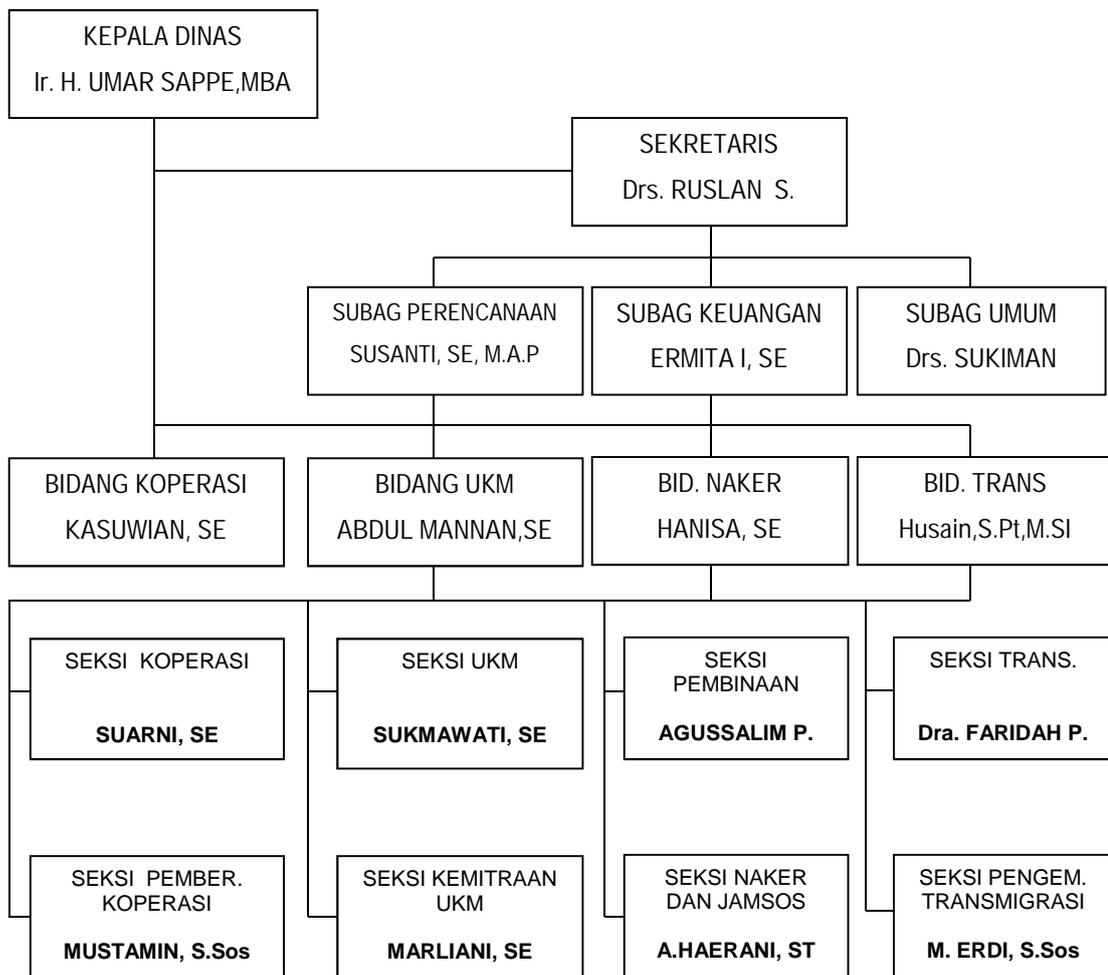
Seksi Kelembagaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kemitraan, pembiayaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Kepala Bidang Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan kegiatan dibidang tenaga kerja.
 1. Seksi Pembinaan, Pelatihan, Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan pembinaan pelatihan, penempatan dan produktifitas tenaga kerja.
 2. Seksi Pembayaran Jamsos dan Kesejahteraan Tenag Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan pembinaan jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
6. Kepala Bidang Transmigrasi
Kepala Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan kegiatan bidang transmigrasi.

1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan kawasan transmigrasi.
2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Tabel 2
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Enrekang



4. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/ organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jasi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 39 orang, terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil(PNS), dan 15 orang Pegawai Tidak tetap (PTT). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol./ Ruang	Bidang Koperasi		Bidang UKM		Bidang Naker		Bidang Trans		Sekretariat		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
III/b	-	1	-	1	-	1	-	-	--	-	-	3	3
III/c	-	-	-	1	-	-	1	-	--	2	1	3	4
III/d	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	3	4	7
IV/a	1	-	1	-	-	1	1	--	-	-	3	1	4
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
TOTAL	6		7		8		9		13		39		

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi (2017).

Jika dilihat pada tabel 3 tersebut di atas, masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, khususnya staf pegawai pada tiap bidang. Staf pegawai pada bidang hanya ada 2 orang dan ada juga bidang yang belum mempunyai staf. Hal ini tentu belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada pada bidang-bidang. Kemudian untuk jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Naker	Bidang Trans.	Jumlah
Honoror	6	2	2	3	2	15
SD/MI	-	-	-	-	-	0
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	0
SLTA/MA	2	1	-	1	1	5
D1	-	-	-	-	-	0
D2	-	-	-	-	-	0
D3	-	-	-	-	-	0
S1	3	3	5	3	2	16
S2	2	-	-	-	1	3
Jumlah	13	6	7	7	6	39

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi (2017).

Pada tabel 4 tersebut di atas, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah cukup memadai dimana tingkat pendidikan untuk Sarjana (S1) lebih banyak dari pada pegawai yang hanya lulusan SLTA/MA.

5. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, maka dilakukan langkah-langkah berupa pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, organisasi, usaha manajemen, dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 5
Perkembangan Jumlah UKM Kab. Enrekang
Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
Jml Kelompok UKM	182		182		189		189		205	
Jml Kel. UMKM Wanita	8		8		3		3		3	
Jml Anggota	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	-	-	-	-	310	290	380	420	350	450
Total Anggota	-		-		600		800		800	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2018).

Tabel 6
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
Kabupaten Enrekang Tahun 2017

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin (Org)		Total
		Perkotaan	Pedesaan	
1.	SD	3447	34992	38439
2.	SMTA	3238	14107	17345
3.	SMTA	6199	17431	23630
4.	Diploma I/II/III/Akademi	1030	2192	3222
5.	Universitas	2939	5247	8186
Jumlah		16853	73969	90822

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2017).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ,strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang sudah cukup berjalan secara optimal.Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan pemberdayaan UKM seperti Pameran serta penyelenggaraan pelatihan bagi wirausaha Pemula serta pembentukan kelompok wirausaha baru.Selain itu, Kegiatan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAbupaten Enrekang memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh para pelaku UKM seperti tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang terlihat pada peningkatan rasa percaya diri,ambisi untuk sukses dalam menjalankan usaha serta berani mengambil resiko guna mengembangkan usaha yang diambil dengan penuh perhitungan dan kreatif dalam menciptakan inivasi dalam usaha.Sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumberdaya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Secara khusus Kabupaten Enrekang cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut hasil penelitian yang digolongkan kedalam beberapa fase sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis strategi yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

A. Fase Inisial

1. Pelatihan

Sesuai dengan hasil penelitian pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat memasarkan produknya dengan baik melalui inovasi kemasan produk, pameran produk, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, dalam rangka pengembangan kapasitas dan kualitas produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka tiap tahun dilakukan studi banding ke daerah-daerah dalam rangka memberikan pelatihan hak paten dan sertifikasi halal kepada masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

Namun demikian jenis pelatihan yang secara umum dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang adalah meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan sosialisasi. Diklat merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan kepada peserta dalam pengembangan usahanya tersebut. Diklat ini rutin dilaksanakan setiap tahun terutama kepada wirausaha pemula dan wirausaha baru. Tujuan utama dari pelatihan ini diharapkan agar dapat memunculkan banyak wirausaha wirausaha baru. Selain itu pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi, bimbingan dan berbagi pengalaman kepada para wirausaha pemula.

Gambar 2
Foto Kegiatan Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah
di Kecamatan Enrekang



Pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu diikuti oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara antusias, hal ini menandakan bahwa para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan usaha mereka.” (Wawancara Kepala Bidang UKM, November 2017).

Sementara workshop merupakan forum diskusi yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam mengembangkan produk-produknya. Sedangkan sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan program-program dan kebijakan terkait pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

2. Penyuluhan

Selain itu, terdapat kendala teknis yang sering dihapapi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kendala yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pengembangan usaha yang lebih kompleks. Hal ini dikemukakan oleh Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang bahwa sarana dan prasana yang digunakan selama penyuluhan masih bersifat tradisional sehingga *output* yang dihasilkan juga kurang maksimal.

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang biasanya langsung disuatu tempat, seperti di kantor desa atau di kantor camat. Kemudian bentuk evaluasinya meliputi proses monitoring hasil daripada kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi tersebut dalam bentuk laporan pertanggung jawaban akuntansi atau keuangan oleh peserta kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

Gambar 3
Foto Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan Pengembangan UKM
di Kecamatan Enrekang



“Pertama jenis kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Enrekang agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua adalah tidak membuat jarak birokrasi dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak merasa segan untuk berkonsultasi” (Wawancara Kabid UKM, November 2017)

Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang saat ini perizinan usaha, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat.

3. Kebijakan

Sementara mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melakukan evaluasi PP Nomor 23 Tahun 2015 tersebut adalah dengan menganalisis dan melihat perkembangan usaha mulai dari yang usaha kecil dan menengah. Kemudian pengawasan dilanjutkan pada sisi modal usaha yang digunakan pada tiap tahunnya, sehingga dapat kita ketahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dijalankan. Setelah itu, menurut Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada bagian akhir pengawasan dilakukan pada proses perdagangannya dipasaran.

Berdasarkan fokus penelitian dalam fase ini terbagi dalam beberapa indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Enrekang. Adapun indikator yang dimaksud adalah pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan terkait dengan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha kecil mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Tabel 7
Program Pengembangan Kompetitif UKM
Kabupaten Enrekang Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian	Dana (Rp.)
1.	Peningkatan kemitraan	Kemitraan UKM	510 UKM	32.000.000,-
2.	Bimbingan teknis	Bimtek UKM	90 UKM	40.000.000,-
3.	Pelatihan	Usaha Mikro	160 Org	40.000.000,-
4.	Pelatihan kewirausahaan	Koperasi/UKM	500 Org	40.000.000,-
Jumlah				152.000.000,-

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2017).

Sementara anggaran menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD. Sedangkan mekanisme monitoring dari pelatihan yang digunakan adalah pemantauan langsung ke lapangan berdasarkan data jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari BPS yang mencapai 1.000 orang. Namun demikian, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah teridentifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang hanya mencapai 800 unit. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan beliau, yakni sebagai berikut :

“Keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil dan menengah menurut data dari BPS adalah sekitar 1.000-an pelaku usaha, namun data yang kita dapatkan melalui kunjungan dan pemantauan ke lapangan sampai dengan tahun 2016 adalah sekitar 800 usaha, sementara di tahun 2017 dan 2018 ini sementara dalam perhitungan untuk di upgrade atau diperbaharui”
 (Wawancara Kabid UMKM, November 2017)

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam

pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lebih kepada peran pelaku usaha yang tidak simultan dalam pelatihan tersebut. Dengan kata lain bahwa masyarakat tertarik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan hanya sekedar untuk memperoleh honor, tetapi tidak menerapkan hasil inovasi pelatihan tersebut. Sehingga pelatihan yang diadakan tersebut terkesan formalitas belaka dan dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah. Selain itu penuturan Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang terkait pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selama 5 tahun terakhir mengalami kendala, yaitu sebagai berikut :

“Jenis-jenis pemberdayaannya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan berbagai cara, diantaranya melalui pelatihan, pameran dan studi banding, baik yang dilakukan di dalam Kabupaten Enrekang maupun di Makassar atau kota-kota lain di Indonesia. Adapun kendala yang kita hadapi adalah masalah produk kita itu masih kalah bersaing dengan produk serupa, walaupun sudah ada produk kita yang khas yaitu krupuk, dangke dan lain-lain, sedangkan produk meubel dan hiasan-hiasan kita masih perlu belajar.” (Wawancara Kabid UKM, November 2017).

Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan dari sumber daya manusia (SDM) terkait pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan melakukan koordinasi ke pasar-pasar daerah. Bahkan menurut Abdul Mannan, SE sebagai Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang

menjelaskan adanya pergeseran paradigma Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu sebagai berikut :

“Terjadi perubahan paradigma baru tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang selama ini mengandalkan semata-mata modal, sekarang dengan paradigma baru modal bukan segala-galanya tapi skill yang ada adalah merupakan modal utama bagi pelaku UKM.” Wawancara Kabid UMKM, November 2017).

Gambar 4
Foto Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan Pengembangan UKM
di Kecamatan Anggeraja



Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat. Menurut Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Enrekang saat ini perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat.

Sementara untuk modalnya semua jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah dibiayai pelatihan yang biasanya memperoleh sarana dan prasarannya dalam bentuk uang kini diganti menjadi produk atau barang-barang.

Keluarnya peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut saat ini Camat memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat atau pelaku usaha dalam pembuatan surat izin usaha. Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

“Pertama jenis kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Enrekang agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua adalah tidak membuat jarak birokrasi dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak merasa segan untuk berkonsultasi” (Wawancara Kabid UKM, November 2017)

Gambar 5
Foto Kegiatan Pendataan, Penyuluhan dan Pengembangan UKM
di Kecamatan Maiwa



Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap produk lain. Selain itu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuat jarak antara birokrasi dengan masyarakat semakin sempit sehingga tidak ada lagi kecanggungan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bahkan dengan kebijakan yang ada sebagai media dan pedoman dalam memperoleh informasi terkait perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Enrekang.

B. Fase Partisipatoris

1. Keterlibatan Masyarakat dalam setiap Program

Fase partisipatoris merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada tahap partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Ini bisa dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha yang cukup berminat pada setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu diikuti oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara antusias, hal ini menandakan bahwa para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan usaha mereka.” (Wawancara Kabid UKM, Februari 2018).

Gambar 6
Foto Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah
di Kecamatan Bungin



Pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang memberikan tunjangan biaya transportasi kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu antusias. Selanjutnya beliau menjabarkan respon yang cukup baik dari masyarakat, lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam berbagai kesempatan, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selalu menanyakan atau meminta kami untuk selalu mengadakan

pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola usaha.”(Kabid UKM, Februari 2018).

2. Antusias Masyarakat dalam Program Pemberdayaan

Tingkat antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil musrenbang terdapat beberapa kecamatan yang mengajukan dan meminta pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di kecamatannya masing-masing.

Salah satu pelatihan yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dan berhasil peneliti temui adalah pelatihan tentang pengembangan usaha melalui pembinaan pemasaran. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang peningkatan produksi hingga pemasarannya. Berikut hasil wawancara salah satu pelaku usaha atau toko sembako yang menjadi peserta pelatihan :

“Pelatihan pengembangan usaha melalui pembinaan pemasaran sangat bermanfaat karena kami mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara pemasaran usaha yang baik”(Masyarakat Pelaku UKM, November 2017).

C. Fase Emansipatoris

1. Asset

Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha) guna mengembangkan usaha mereka. Asset usaha kecil, mikro, dan menengah di Kabupaten Enrekang dapat dilihat berdasarkan kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam hal ini asset usaha dikalkulasi secara keseluruhan dari data-data yang diperoleh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, yakni asset usaha kecil mencapai 50 juta dan untuk usaha mikro mencapai 300 juta. Sedangkan asset usaha menengah mencapai 1 miliar. Ini membuktikan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup menjanjikan pada sisi assetnya.

2. Volume Usaha

Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha masyarakat sebagai pelaku usaha. Adapun volume usaha dalam hal ini dihitung secara menyeluruh dari semua jenis usaha yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Untuk usaha kecil volume usaha berkisar 100 juta, sementara usaha mikro berkisar 300 juta. Sedangkan volume usaha menengah berkisar 2 miliar.

3. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut. Sisa hasil usaha diperoleh dari volume usaha yang bersumber dari asset usaha. Secara umum sisa hasil usaha juga dihitung secara menyeluruh untuk semua usaha yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Adapun sisa hasil usaha untuk usaha kecil mencapai 20 % dan usaha mikro mencapai 30 %. Serta usaha

menengah mencapai 40 %. Jika dilihat ini merupakan hasil yang sangat maksimal dalam menopang PAD secara keseluruhan.

Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif.

C. Pembahasan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang telah terbukti memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumberdaya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Secara khusus Kabupaten Enrekang cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan PAD. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis strategi yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan UKM.

A. Fase Inisial

1. Pelatihan

Sesuai dengan hasil penelitian pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat memasarkan produknya dengan baik melalui inovasi kemasan produk, pameran produk, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, dalam rangka pengembangan kapasitas dan kualitas produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka tiap tahun dilakukan studi banding ke daerah-daerah dalam rangka memberikan pelatihan hak paten kepada masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

Namun demikian jenis pelatihan yang secara umum dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang adalah meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan sosialisasi. Diklat merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan kepada peserta dalam pengembangan usahanya tersebut. Sementara workshop merupakan forum diskusi yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang untuk

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam mengembangkan produk-produknya. Sedangkan sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan program-program dan kebijakan terkait pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

2. Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang biasanya langsung disuatu tempat, seperti di kantor desa atau di kantor camat. Kemudian bentuk evaluasinya meliputi proses monitoring hasil daripada kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi tersebut dalam bentuk laporan pertanggung jawaban akuntansi atau keuangan oleh peserta kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

Selain itu, terdapat kendala teknis yang sering dihapapi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kendala yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pengembangan usaha yang lebih kompleks. Hal ini dikemukakan oleh Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang bahwa sarana dan prasana yang digunakan selama penyuluhan masih bersifat tradisional sehingga *output* yang dihasilkan juga kurang maksimal.

3. Kebijakan

Sementara mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melakukan evaluasi PP Nomor 23 Tahun 2015 tersebut adalah dengan menganalisis dan melihat perkembangan usaha mulai dari yang usaha kecil dan menengah. Kemudian pengawasan dilanjutkan pada sisi modal usaha yang digunakan pada tiap tahunnya, sehingga dapat kita ketahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dijalankan. Setelah itu, menurut Kabid Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada bagian akhir pengawasan dilakukan pada proses perdagangannya dipasaran.

B. Fase Partisipatoris

1. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program

Secara umum setiap program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang berjalan efektif, seperti pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terkait Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kepada masyarakat. Hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahwa setiap pelatihan yang dilaksanakan tersebut mendapat respon yang cukup baik oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap program peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang cukup baik. Bahkan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil

sangat bagus meski masih berjalan agak lamban yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia.

2. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

Tingkat antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil musrenbang terdapat beberapa kecamatan yang mengajukan dan meminta pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di kecamatannya masing-masing.

Salah satu pelatihan yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dan berhasil peneliti temui adalah pelatihan tentang pengembangan usaha melalui pembinaan pemasaran. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang peningkatan produksi hingga pemasarannya. Berikut hasil wawancara salah satu pelaku usaha atau toko sembako yang menjadi peserta pelatihan :

“Pelatihan pengembangan usaha melalui pembinaan pemasaran sangat bermanfaat karena kami mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara pemasaran usaha yang baik” (Masyarakat Pelaku UKM, November 2017).

C. Fase Emansipatoris

1. Asset

Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha) guna mengembangkan usaha mereka. Asset usaha kecil, mikro, dan menengah di Kabupaten Enrekang dapat dilihat berdasarkan kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam hal ini asset usaha dikalkulasi secara keseluruhan dari data-data yang diperoleh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, yakni asset usaha kecil mencapai 50 juta dan untuk usaha mikro mencapai 300 juta. Sedangkan asset usaha menengah mencapai 1 miliar. Ini membuktikan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup menjanjikan pada sisi assetnya.

2. Volume Usaha

Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha masyarakat sebagai pelaku usaha. Adapun volume usaha dalam hal ini dihitung secara menyeluruh dari semua jenis usaha yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Untuk usaha kecil volume usaha berkisar 100 juta, sementara usaha mikro berkisar 300 juta. Sedangkan volume usaha menengah berkisar 2 miliar.

3. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut. Sisa hasil usaha diperoleh dari volume usaha yang bersumber dari asset usaha. Secara umum sisa hasil usaha juga dihitung secara menyeluruh untuk semua usaha yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Adapun sisa hasil usaha untuk usaha kecil mencapai 20 % dan usaha mikro mencapai 30 %. Serta usaha

menengah mencapai 40 %. Jika dilihat ini merupakan hasil yang sangat maksimal dalam menopang PAD secara keseluruhan.

Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu :

1. Fase inisial, pelaksanaan pelatihan, penyuluhan dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat pelaku UKM, sudah cukup berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan pemberdayaan UKM seperti Pelatihan dan Penyuluhan bagi wirausaha pemula dan pembentukan wirausaha baru. Agar tidak bertentangan dengan tujuan Pemerintah itu sendiri maka Pemerintah mengeluarkan Ultimatum atau aturan atau kebijakan berupa bantuan modal serta kelengkapan saran dan prasarana.
2. Fase Partisipatoris, Keterlibatan masyarakat dalam setiap program serta antusias masyarakat dalam program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ini telah memberikan dampak nyata seperti, Keaktifan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Masyarakat pelaku UKM ini saling mendukung dan saling memberi pendapat satu sama lain dan juga dapat menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan tersebut.
3. Fase Emansipatoris, pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usahanya, namun dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ini terdapat

keterbatasan sumber daya manusia serta terbatasnya anggaran yang dimiliki sehingga tidak bisa menjangkau para pelaku Usaha Kecil Menengah dalam jumlah banyak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Enrekang. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fase Inisial ini melalui Pelatihan, Penyuluhan dan Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat pelaku UKM, maka masyarakat perlu membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan tersebut.
2. Fase Partisipatoris ini melalui keterlibatan masyarakat dan antusias masyarakat dalam pemberdayaan UKM ini maka diharapkan kepada masyarakat pelaku UKM agar mempertahankan serta meningkatkan komunikasi yang erat kepada Pemerintah terkait.
3. Fase Emansipatoris ini yang meliputi Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha maka diharapkan kepada para masyarakat pelaku UKM lebih mengembangkan usaha tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal untuk menopang PAD secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrews. 1980. Konsep Strategi Perusahaan, Edisi Revisi. Homewood. IL: Richard D. Irwin.
- Argyris, C. 1985. Rutinitas Strategi, Perubahan & Defensif. Boston: Piman.
- Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang. 2011.
- Chandler. 1962. *Strategi dan Struktur*. Bab Dalam Sejarah Enterprise Industri Amerika.
- Chaffee. 1985. *Tiga Model Strategi Akademi Manajemen Review*.
- David, 2010. *Manajemen Strategis: Pendekatan Keunggulan Kompetitif, Konsep dan Kasus* (Edisi 13). Prentice Hall International, London
- Hammel & Prahalad. *Kompetisi Masa Depan*. Trans. Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara. 1995. Trans. Trans. Bersaing untuk Masa Depan. 1994
- Garna. 2000. *Ilmu-ilmu Sosial Konsep, sisi*. Bandung : Pasca Sarjana UMPAD.
- Mintzberg, 1979. dalam formasi strategi. Ilmu Manajemen
- Meleong j. Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Totok & Purwoko 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Najiati, Sri, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International
- Pranaka dan Priyono. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Pusat Studi Strategis dan Internasional
- Freddy 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Ginjar Kartasmita,1996.*Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat.*Jakarta:Bappenas

Miner, 1977. Manajemen kepolisian dan strategi. New York: Macmillan.

Sanusi,Anwar,2014.*Metodologi Penelitian Bisnis.*Jakarta:Salemba Empat

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi.* Bandung : Refika Aditama

Stoner.1996, Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit
PT. Prenhallindo,

Sumodiningrat, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Social.*
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian 2004. Manajemen Stratejik. Jakarta : Bumi Aksara.

SUMBER INTERNET

Diskoperindag.enrekangkab.co.id. 2015

Diskopukmnakertrans@kab.enrekang.2017

SKRIPSI DAN TESIS

Chariri,Anis.2009:05.*Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif.*Paper disajikan pada workshop Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif,Laboratorium Pengemabngan Akuntansi (LPA):UNDIP Semarang

Garna. 2000. *Ilmu-ilmu Sosial Konsep, sisi.* Bandung : Pasca Sarjana UMPAD.

Nurhajati. 2005. *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi.* Malang : UNISMA. Skripsi.

Nursalam. 2010. *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.* Malang. Skripsi.

Sudaryanto, Ragumin, dan Rina Wijayanti. 2014. *Strategi Pemberdayaan UMKM Mengadapi Pasar Bebas Asean*. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. Skripsi.

SUMBER LAIN

Chariri, Anis. 2009:05. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper disajikan pada workshop Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998. Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Lamanya Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Fase Inisial

- a) Pelatihan apa saja yang diberikan kepada masyarakat terhadap produk UKM yang dihasilkan?
- b) Dimana saja penyuluhan dilaksanakan dan penyuluhan apa yg diberikan kepada masyarakat pelaku UKM.
- c) Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap masyarakat pelaku UKM?

2. Fase Partisipatoris

- a) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap program peingkatan UKM ?
- b) Bagaimana antusias masyarakat dalam program pemberdayaan UKM?

3. Fase Emansipatoris

- a) Apakah kegunaan asset yang dimiliki masyarakat pelaku UKM?
- b) Bagaimana volume usaha yang dihasilkan masyarakat ?
- c) Bagaimana perkembangan Sisa hasil usaha yang dihasilkan masyarakat ?

DATA PEKERJAAN

Instansi : DINAS KOPERASI,UKM,TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Alamat : Jl.Jendral Sudirman Kantor GADIS lt.2 KAb.Enrekang

Jabatan : Staf Kasubag Keuangan

Mulai Bekerja : 01 Januari 2008

PEDOMAN OBSERVASI

A. IDENTITAS TEMPAT OBSERVASI

1. Nama Tempat : Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Alamat : Jln.Jendral Sudirman Kab.Enrekang Kantor GADIS
lantai 2
3. Waktu Observasi : Tanggal 18 Oktober 2017 s/d 18 November 2017

B. HAL-HAL YANG DI OBSERVASI

1. Strategi Pemberdayaan yang dilakukan Bidang UKM kepada masyarakat pelaku UKM.
2. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan.
3. Kesimpulan Observasi.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

1. Identitas tempat : Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Alamat : Jln.Jendral Sudirman Kab.Enrekang Kantor Gadis LT.2
3. Waktu Pengambilan dokumen : Tanggal 18 Oktober s/d 18 November 2017
4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dokumen yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan UKM pada Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 1. Dokumen/arsip yang berhubungan dengan Strategi Pemberdayaan UKM pada Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. Dokumen/Foto-foto masyarakat pelaku UKM di Kabupaten Enrekang.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : MULIANTI
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 11 Maret 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku : Maspuḷ
Status : Kawin
Alamat : Pudukku Desa Pundilemo Kec.Cendana Kab.Enrekang
No. Telpn : 082 291 956 514
Email : mulianti34@yahoo.com

Data Pribadi

Ayah : SAMIDA
Ibu : NANCING
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara
Suami : SYAHARUDDIN
Anak : 1. NABILAH PUTRI SYALIANI
2. ALBHI PUTRA SYALIANI

Data Pendidikan

SD : SD NEGERI 26 MASSEMBA
SLTP : SLTP NEGERI 1 ENREKANG
SMU : SMK PGRI ENREKANG

DATA PEKERJAAN

Instansi : DINAS KOPERASLUKM.TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Alamat : Jl.Jendral Sudirman Kantor GADIS lt.2 KAb.Enrekang

Jabatan : Staf Kasubag Keuangan

Mulai Bekerja : 01 Januari 2008